

## KINERJA PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA STUDI KASUS PROVINSI DI PULAU JAWA

Aniek Juliarini

ajuliarini@gmail.com

BDK Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI

### Abstrak

*Provinsi-provinsi di pulau Jawa merupakan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Bahkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menempati ranking pertama dan kedua IPM secara nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja pendapatan terhadap IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian membandingkannya secara relative dengan capaian nasional. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni dengan menganalisis secara deskriptif terhadap hasil data yang diolah secara ekonometris. Data penelitian berupa data pendapatan daerah dan IPM provinsi tahun 2010—2016 diambil dari Badan Pusat Statistik. Regresi linier dilakukan dengan pendapatan daerah sebagai variable bebas dan IPM sebagai variable terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan sangat kuat dengan tingkat kepercayaan 99%, antara pendapatan daerah terhadap IPM di seluruh provinsi di pulau Jawa. Dilihat dari besaran peningkatan IPM untuk setiap tambahan pendapatan maka provinsi DIY memiliki kinerja yang paling baik, diikuti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja di atas rata-rata provinsi secara nasional.*

### Abstract

*The provinces of Java have high Human Development Index (HDI). DKI Jakarta and DI Yogyakarta are ranked in the first and second of national HDI. This study analyzes the performance of HDI in the provinces of Java including DKI Jakarta, West Java, Banten, DI Yogyakarta, Central Java, and East Java, and then compares it relatively to the achievement of HDI nationally. The research method is descriptive qualitative by analyzing descriptively the results of data that are processed econometrically. The research data are data of regional income and HDI data for year 2010-2016, taken from the Central Bureau of Statistics. The linear regression is done by conveying the regional income as the independent variable and HDI as the dependent variable. The study shows that there is a positive and very strong correlation with a 99% confidence level between the regional income towards HDI in all provinces of Java. Judging from the magnitude of the increase in HDI for each additional income, DIY province has the best performance, followed by Banten, East Java, Central Java, West Java and DKI Jakarta. All provinces of Java show good performance because their performance are above the achievement nationally.*

**Kata Kunci:** pendapatan daerah, Indeks Pembangunan Manusia, *Human Development Indeks*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Lincoln Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain

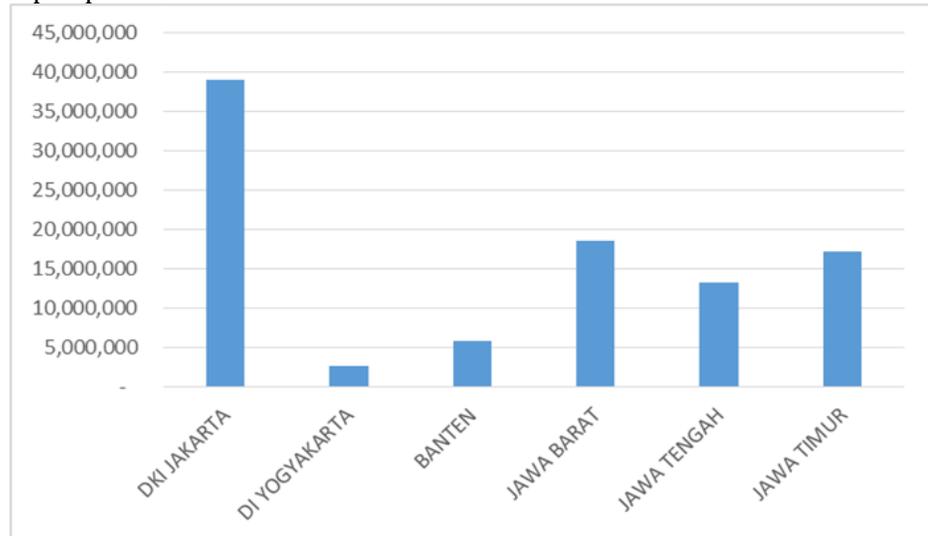
bahwa apa yang disebut dengan “*trickle down effects*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan.

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keragaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Penyebab terjadinya kesenjangan yang terjadi antardaerah di Indonesia diantaranya dapat diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan keuangan antardaerah. Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marjinal pada output. Infrastruktur yang layak dan tepat dapat membantu mendorong berbagai kegiatan ekonomi melalui fungsinya yang dapat melancarkan proses produksi dan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Sementara itu kesenjangan dari sisi kemampuan keuangan antardaerah dapat dilihat dari aspek jumlah pendapatan daerah, dan kualitas belanja daerah. Kedua aspek di atas memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian daerah. (Bappenas, 2013).

Salah satu tolok ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS,-). IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nation Development Programe (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

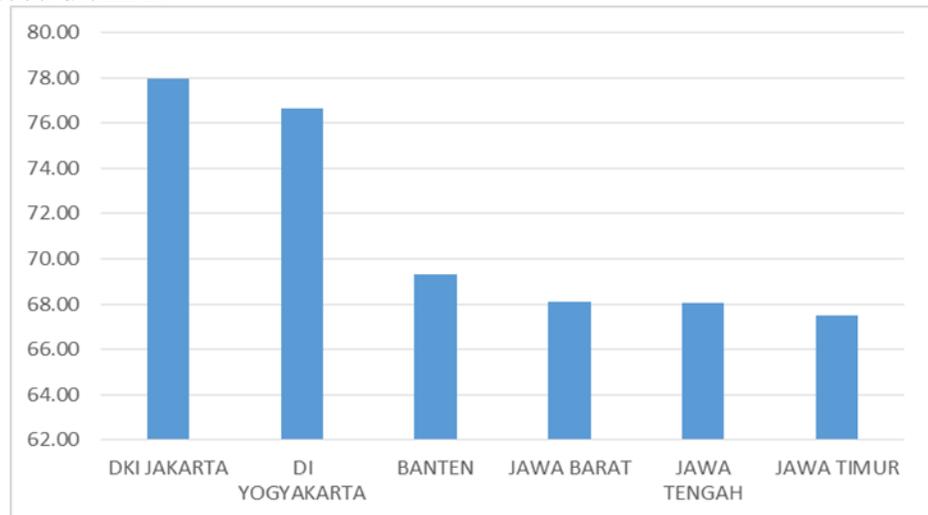
Dari 188 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 113 dalam pencapaian IPM (UNDP, 2014). Negara yang tercatat paling sejahtera adalah Norwegia dengan IPM 94,9 (termasuk dalam Negara *Very High Human Development Indeks*). Indonesia dengan IPM 68,9 termasuk dalam Negara dengan *Medium Human Development Indeks*. (<http://hdr.undp.org>). Di Indonesia, peningkatan pendapatan daerah dan IPM pada provinsi-provinsi di seluruh Indonesia tidak berjalan seragam. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kebijakan pemerintah daerah setempat, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain-lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM tahun 2016 rata-rata seluruh provinsi di Indonesia adalah 70,18. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi yakni 79,60 sementara Provinsi DI Yogyakarta berada di urutan kedua dengan IPM 78,38. Pendapatan daerah provinsi

seluruh Indonesia rata-rata pada tahun 2016 mencapai Rp8.105 milyar, dengan pendapatan tertinggi DKI Jakarta dan terendah provinsi Gorontalo (Juliarini, 2018). Pendapatan daerah rata-rata provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada periode tahun 2010—2016 tampak pada Grafik 1.



Grafik 1. Pendapatan Daerah Rata-rata tahun 2010—2016 Provinsi di Pulau Jawa  
 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Dari Grafik 1 terlihat bahwa rata-rata pendapatan Provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki rata-rata pendapatan yang hampir sama, diikuti kemudian oleh Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki pendapatan paling kecil. Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia propinsi di Pulau Jawa rata-rata tahun 2010—2016 tampak pada Grafik 2.



Grafik 2. Indeks Pembangunan manusia rata-rata tahun 2010—2016 provinsi di Pulau Jawa

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010), diolah.

Dari grafik 2 terlihat bahwa rata-rata IPM tahun 2010—2016 tertinggi dicapai oleh DKI Jakarta, kemudian diikuti DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Membandingkan dua grafik di atas tampak bahwa korelasi pendapatan daerah dengan IPM pada masing-masing provinsi sangat berbeda. Pendapatan daerah yang tinggi tidak selalu diikuti dengan IPM yang tinggi pula. Hasil kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia memberikan hasil yang berbeda-beda antar daerah. Kondisi ini pula yang terjadi antarprovinsi di Indonesia, di mana perbedaan hasil-hasil pembangunan ekonomi memperlihatkan adanya suatu ketimpangan ekonomi antarprovinsi yang cukup besar (Kusriyawanto, 2014). Dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010”, Kusriyawanto menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan semakin besarnya komposisi atau peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran Pajak Daerah dan Retribusi. Pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan kesehatan pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Maiharyanti, Eva (2011) melakukan penelitian “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Nanggroe Aceh Darussalam”, dengan sampel sejumlah 21 (dua puluh satu) pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan selama dua tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 untuk Realisasi DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan BM (Belanja Modal). Sedangkan untuk IPM dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sehingga menjadi 42 (empat puluh dua) unit analisis amatan (21 x 2). Penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, dan pendapatan asli daerah berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal.

Yuliani, Tutik (2015) dalam penelitiannya berjudul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan AntarKabupaten di Kalimantan Timur” mengemukakan hasil analisisnya tentang ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2012. Disimpulkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antarwilayah.

Sementara itu BPS mengemukakan bahwa perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi yang logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Sebaran sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah telah

menimbulkan adanya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antar daerah sangat tinggi.

Smit Sangh (2016) melakukan penelitian berjudul “*Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis*”. Dalam makalahnya, Shah menyimpulkan tentang faktor-faktor penentu indeks pembangunan manusia (IPM) seperti PDB per-kapita, tingkat melek huruf, harapan hidup saat lahir, Gini indeks, tingkat kesuburan dan emisi Co2 signifikan dalam analisis regresi empiris. Dalam analisis kebijaksanaan wilayah, dikemukakan bahwa Eropa & Asia Tengah dan Amerika Latin, dan Karibia memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, sementara Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih rendah. Peningkatan IPM tersebut dapat dicapai melalui tiga dimensi - Indeks Pendidikan, Indeks Pendapatan, dan indeks Kesehatan.

Maulana, Ridwan dan Prasetyo Ari Bowo (2013) melakukan penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia.

Dengan semakin bertambahnya pendapatan daerah dan bervariasinya pendapatan antardaerah provinsi di Indonesia, menjadi menarik untuk dikaji bagaimanakah pengaruh pendapatan daerah provinsi terhadap IPM khususnya di provinsi-provinsi di pulau Jawa, mengingat Jawa merupakan pusat perputaran uang dan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Selain meneliti seberapa besar pengaruh pendapatan daerah provinsi terhadap peningkatan IPM, perlu diteliti pula bagaimana keberhasilan relative (kinerja) provinsi-provinsi tersebut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui pencapaian IPM. Rumusan penelitian ini adalah “**Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi-provinsi di pulau Jawa, dan bagaimana kinerja masing-masing provinsi dalam pencapaian IPM-nya?**”. Wilayah penelitian meliputi seluruh provinsi di pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis bagaimana hubungan antara pendapatan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan nasional Indonesia;
2. menganalisis seberapa besar kinerja pendapatan terhadap IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan nasional Indonesia;
3. mengevaluasi kinerja masing-masing provinsi dengan melakukan komparasi relatif antarprovinsi dan membandingkannya dengan kinerja nasional Indonesia.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN MODEL PENELITIAN

### 2.1. Tinjauan Literatur

#### 2.1.1. Uji Normalitas dan Uji Korelasi

Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat apakah data yang akan dilakukan regresi memiliki distribusi normal. Uji Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik.

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang kita uji normal.

Ahli ekonomi atau ahli-ahli bidang lainnya sering menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antarvariabel. Apabila ternyata hasil analisis menunjukkan hubungan yang cukup erat maka analisis dilanjutkan ke analisis regresi sebagai alat meramalkan (*forecasting*) yang sangat berguna untuk perencanaan. (Supranto, 2009). Analisis korelasi yang mencakup dua variabel, X dan Y, disebut analisis korelasi linier sederhana, sedangkan yang mencakup lebih dari dua variabel disebut analisis korelasi linier berganda.

Terdapat beberapa macam teknik korelasi, yaitu korelasi Pearson Product Moment ( $r$ ), korelasi rasio ( $n$ ), Korelasi Spearman Rank ( $p$ ), korelasi Biserial ( $rb$ ), dan sebagainya. (Sugiyono, 2014). Panduan interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, nilai  $p$ , dan arah korelasi adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Panduan Interpretasi Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Kekuatan Korelasi, Nilai p, dan arah korelasi  
Sumber: Dahlan (2001)

NO	PARAMETER	NILAI	INTERPRETASI
1	Kekuatan korelasi (r)	0,00—0,199 0,20—0,399 0,40—0,599 0,60—0,799 0,80—1,000	Sangat lemah Lemah Sedang Kuat Sangat kuat
2	Nilai p	$P < 0,05$  $P > 0,05$	Terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji  Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji
3	Arah korelasi	+ (positif)  _ (negative)	Searah. Semakin besar nilai satu variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya.  Berlawanan arah. Semakin besar nilai satu variabel semakin besar pula nilai variabel lainnya.

### 2.1.2. Regresi Sederhana

Salah satu tujuan analisis data ialah untuk memperkirakan/memperhitungkan besarnya efek atau pengaruh kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Setiap kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, selalu dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sesuai dengan keinginan/harapan. (Supranto, 2009). Dapat dicontohkan misalnya peningkatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, atau peningkatan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk keperluan evaluasi suatu kebijakan sering kali ingin diketahui besarnya efek kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya, misalnya efek perubahan pendapatan terhadap perubahan tingkat hidup masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut, untuk keperluan analisis, bisa dinyatakan dalam nilai variabel. Untuk analisis dua kejadian digunakan dua variabel, yaitu variabel X (misalnya pendapatan) dan variabel Y (misalnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai *outcome* dari pendapatan). Apabila dua variabel tersebut mempunyai hubungan (korelasi) maka perubahan nilai variabel yang satu (X) akan memengaruhi nilai variabel lainnya (Y).

Hubungan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya  $Y = f(X)$ . Jika bentuk fungsinya sudah diketahui, dengan mengetahui nilai dari satu variabel (X) maka nilai variabel lainnya (Y) dapat diperkirakan. Untuk membuat ramalan Y dari variabel X maka X dan Y harus mempunyai hubungan yang kuat. Kuatnya

hubungan X dan Y diukur dengan koefisien korelasi, sedangkan besarnya pengaruh X ke Y diukur dengan koefisien regresi. X merupakan variabel bebas (*independent variable*) dan Y merupakan variabel terikat (*dependent variable*).

Untuk memperkirakan hubungan fungsi antara dua variabel perlu dibuat asumsi terlebih dahulu mengenai bentuk hubungannya dalam fungsi tertentu. Sebagai contoh jika pendapatan daerah meningkat maka asumsinya tingkat kehidupan masyarakat (IPM) meningkat pula. Dalam beberapa hal kita dapat mengecek asumsi tersebut setelah hubungan diperkirakan. Hubungan yang linier mempunyai bentuk sebagai berikut:

$$Y = A + BX,$$

di mana A dan B adalah konstanta atau parameter yang nilainya harus diestimasi.

A merupakan besarnya Y jika  $X=0$ , sering disebut sebagai *intercept coefficient*.

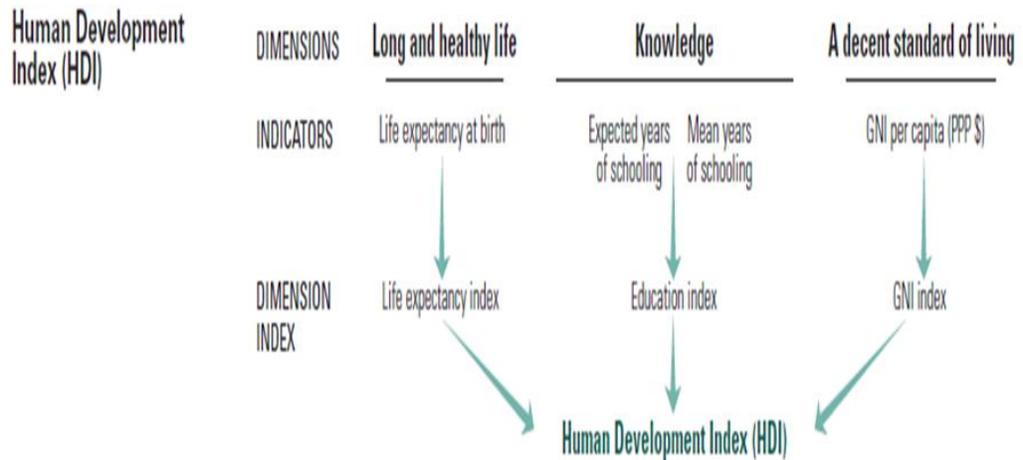
B adalah besarnya pengaruh X terhadap Y jika X naik 1 unit, sering disebut *slope coefficient*.

Sebagai contoh, jika ditemukan persamaannya adalah  $Y = 30 + 0,5 X$  maka secara teoritis jika  $X = 100$  maka Y seharusnya 80. Namun dalam praktiknya tidak demikian karena yang memengaruhi Y bukan X saja namun masih ada faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Faktor ini disebut kesalahan pengganggu atau *disturbance error*. Kesalahan pengganggu ini menyebabkan suatu ramalan sering tidak tepat. Kesalahan pengganggu tidak dapat dihilangkan, namun dalam membuat sebuah model maka kesalahan pengganggu ini harus dibuat sekecil mungkin agar peramalan yang dilakukan bisa lebih akurat.

### 2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menekankan bahwa orang-orang dan kemampuan mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja. IPM juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat *Gross National Income (GNI)* per kapita yang sama dapat berakhir dengan hasil pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat menstimulasi perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia: kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan dinilai oleh harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata tahun sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun atau lebih, dan tahun yang diharapkan anak-anak usia sekolah memasuki sekolah. Standar dimensi hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. IPM menggunakan logaritma pendapatan, untuk mencerminkan semakin berkurangnya pendapatan dengan meningkatnya GNI. Skor untuk tiga indeks dimensi IPM kemudian dikumpulkan ke dalam indeks komposit menggunakan *mean geometrik*.



Gambar 3. Tiga Dimensi Indeks Pembangunan Manusia  
 Sumber: <http://hdr.undp.org>

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

Untuk menghitung Indeks Komponen, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

Dimensi pendidikan:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimensi pengeluaran:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Penentuan nilai maksimum adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Sumber: Badrudin, 2017

KOMPUNEN IPM	MAKSIMUM	MINIMUM	KETERANGAN
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata2 Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	732.720	300.000 (1996) 360.000 (1999,2002)	UNDP menggunakan PDB riil disesuaikan

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy*) merupakan rata-rata perkiraan usia (dalam tahun) seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*) ialah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Untuk melihat capaian IPM antarwilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- IPM < 60 : IPM rendah
- 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang
- 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi
- IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

(Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik - Badan Pusat Statistik, 2015)

#### **2.1.4. Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah menjadikan setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Sumber Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memungut lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selain itu, Pemerintah Provinsi dapat memungut retribusi meliputi retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Lain-lain PAD yang Sah mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

##### **b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat, bersumber dari pendapatan APBN (Transfer ke Daerah) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Badrudin, 2017). Sebelum tahun 2016 Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Transfer

Lainnya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mulai Tahun 2016 setelah berlakunya PMK Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfer ke Daerah diubah menjadi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY. Perubahan juga terjadi pada jenis Dana Perimbangan yang semula terdiri dari DBH, DAU, dan DAK, sejak 2016 menjadi Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum (*General Purpose Grant*) dan Dana Transfer Khusus (*Spesific Transfer Grant*). Dana Transfer Umum dibagi menjadi DBH dan DAU, sementara Dana Transfer Khusus dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) adalah bagian daerah yang berasal dari penenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. Sementara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penenaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Transfer Dana Bagi Hasil meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam. Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.

#### c. Pinjaman Daerah

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah (PP 58 tahun 2005 Pasal 1 Angka 59).

#### d. Pendapatan Lain yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Halim (2002) mengemukakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan tercermin pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tiap tahun. APBD sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan daerah dapat digunakan sebagai instrumen yang tepat untuk menganalisis sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu program (kinerja) oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. James B. Wittaker dalam Bastian (2006) menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam konteks organisasi sektor publik, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### 2.1.5. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia telah dilakukan baik itu dengan menggunakan metode deskriptif, statistik maupun ekonometri.

Gustav Ranis (2005) dalam artikelnya "*Human Development: Beyond the HDI*" mengidentifikasi seperangkat ukuran pilihan yang lebih luas (11 variabel) yang mungkin memenuhi syarat sebagai bagian dari Human Development dan untuk menganalisis seberapa baik atau buruk daftar pilihan yang lebih luas dalam IPM dengan menggunakan data lintas negara internasional. Makalah ini telah mengeksplorasi cara-cara yang mungkin untuk memperbesar pemahaman dalam pengukuran Pembangunan Manusia.

Nujum, Syamsu, dkk (2013) dalam penelitiannya berjudul "*Analysis Of The Reciprocal Relationship Of Local Government Expenditure Towards Human Development Index (HDI) And Its Influence On Economic Performance In South Sulawesi*" menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di kota Makassar rata-rata 78,11 persen selama periode 2008-2013, lebih tinggi dari Kabupaten Takalar dan Gowa, Maros. Indeks pembangunan manusia Kota Makassar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kinerja saat ini. Di Takalar, Gowa, dan Maros, secara bersamaan pinjaman dan HDI berpengaruh signifikan, tetapi menunjukkan pengaruh sebagian secara proporsional dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan ekonomi.

Melliana, Ayunanda, dkk (2013) melakukan penelitian " Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur" melakukan pengolahan data dengan menggunakan regresi data panel yaitu

gabungan antara data cross section dan time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), jumlah sarana kesehatan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan PDRB perkapita.

Iskandar, Azwar and Subekan, Achmat (2014) melakukan penelitian “Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)”. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan lokal terhadap kesejahteraan sosial di kabupaten dan kota Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2012. Kinerja keuangan lokal sebagai variabel independen diwakili oleh tingkat otonomi, efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan lokal. Kesejahteraan sosial sebagai variabel tergantung diwakili oleh IPM. Hasil empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan lokal secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Tingkat otonomi daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Sementara itu, efektivitas kinerja keuangan lokal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial, dan efisiensi kinerja keuangan daerah secara parsial memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

## 2.2. Model Penelitian

Untuk menganalisis besarnya pengaruh pendapatan terhadap IPM, digunakan model penelitian analisis regresi linier sederhana, dengan pendapatan daerah per-provinsi per tahun sebagai variabel bebas dan data IPM per-provinsi per tahun sebagai variabel terikat. Hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat dimana variabel bebas (pendapatan) memengaruhi variabel terikat (IPM) (Sugiyono, 2014). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b X,$$

dengan variabel-variabel:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (variabel terikat)

a = konstanta

b = koefisien regresi

X= pendapatan (variabel bebas)

Setelah dilakukan proses regresi, analisis berikutnya adalah membandingkan secara kualitatif kinerja masing-masing provinsi dan dibandingkan dengan performance nasional, dengan melihat apakah koefisien regresi provinsi yang bersangkutan lebih tinggi atau lebih rendah dari koefisien regresi rata-rata nasional. Kinerja pemerintah provinsi yang bersangkutan dikatakan “Baik” jika koefisien regresi-nya lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh provinsi di Indonesia dan sebaliknya digolongkan “kurang baik” apabila koefisien regresi provinsi lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh provinsi di Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN

Guna menjawab pertanyaan penelitian maka dilakukan penelitian dengan cara mengolah data sekunder, yaitu data pendapatan daerah per provinsi dan data IPM per provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data diolah secara statistic ekonometris dengan menggunakan regresi linier sederhana. Untuk melihat arah hubungan dan

kekuatan hubungan antara pendapatan dengan IPM di ke enam provinsi di Pulau Jawa, dilakukan dengan Uji Normalitas dan Uji Korelasi.

### 3.1. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data *cross-section* provinsi dengan data series tahun. Data pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016 diperoleh dari laman BPS. Data pendukung analisis berupa data wilayah dan jumlah penduduk diperoleh dari laman Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya diperoleh dari berbagai sumber yaitu penelitian terdahulu, buku, dan sumber-sumber lainnya.

### 3.2. Variabel operasional

Variabel operasional yang digunakan adalah:

X= pendapatan , sebagai variabel bebas (*independent variabel*)

Y = Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat (*dependent variabel*)

Setelah dilakukan uji hubungan dan uji korelasi, kemudian dilakukan regresi antara pendapatan daerah propinsi dengan IPM untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa dan untuk rata-rata nasional. Selanjutnya diperbandingkan, apakah koefisien regresi provinsi yang bersangkutan lebih tinggi atau lebih rendah dari koefisien regresi rata-rata nasional.

### 3.3. Metode Analisis Data

Untuk mengukur dan membandingkan kinerja pemerintah daerah provinsi yang dijadikan obyek penelitian, dilakukan analisis data sebagai berikut.

- a. Menguji kekuatan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent pada masing-masing provinsi dan pada Indonesia.
- b. Menghitung variabel-variabel penelitian per-provinsi dan Indonesia sesuai formula yang digunakan.
- c. Menginterpretasikan persamaan regresi yang terbentuk untuk masing-masing provinsi dan Indonesia
- d. Membandingkan secara relative besaran hubungan antara pendapatan daerah dan IPM semua provinsi dengan nasional secara deskriptif.

### 3.4. Objek penelitian

Objek penelitian adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa meliputi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah sentra pembangunan, dengan pendapatan daerah rata-rata tinggi dan jumlah penduduk yang tinggi pula. Kuswariyanto (2014) mencatat bahwa provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai PDRB rill cukup tinggi meninggalkan provinsi lainnya, misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ada di Jawa, dan penduduk Indonesia 60-70 persen ada di Jawa pula (kompas.com). Oleh karena itulah, pulau Jawa dipilih sebagai wilayah penelitian ini.

Data yang diolah berupa data sekunder yaitu data panel berupa data pendapatan daerah dan data IPM pada provinsi-provinsi di wilayah penelitian untuk tahun 2010—2017, yang diperoleh dari BPS. Terhadap data dilakukan uji normalitas Kolmogorov

Smirnov dan uji korelasi Pearson. Setelah semua uji terpenuhi selanjutnya dilakukan regresi dan terhadap hasilnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Gambaran wilayah penelitian

Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke-5 di Indonesia. Dengan populasi sekitar 145 juta jiwa, Jawa menjadi tempat tinggal 56,64% penduduk Indonesia yang seluruhnya berjumlah 256 juta pada tahun 2015. Pulau Jawa terbagi atas lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Gambar 4)



Gambar 4. Pulau Jawa yang Terbagi dalam 6 Provinsi

Sumber: <http://www.wisataarea.com>

DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia. Jakarta, memiliki luas 664,01 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 9.988.495 jiwa (Kemendagri.go.id). Jakarta merupakan pusat pemerintahan, sekaligus pusat perdagangan dan bisnis sehingga wilayah ini menarik minat banyak orang untuk bekerja mencari penghasilan di sini. DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan. Provinsi Jawa Barat beribukota di Bandung. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang subur, dengan luas wilayah 35.377,76 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 42.332.370 jiwa. Dengan adanya pemekaran daerah maka sejak tanggal 4 Oktober 2003 Banten yang semula merupakan wilayah Jawa Barat resmi menjadi sebuah provinsi sendiri dengan Ibukota Serang ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)). Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 9.978.932 jiwa.

Provinsi Jawa Tengah terletak di sebelah timur Jawa Barat, beribukota di Semarang, dengan luas wilayah mencapai 32.800,69 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 34.897.757 jiwa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi kecil yang terletak di sisi selatan Jawa Tengah. DIY merupakan salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia dan beribukota di Yogyakarta. Luas wilayah DIY 3.133,15 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.542.078 jiwa. Pertumbuhan jumlah

penduduk di propinsi ini cukup tinggi sehubungan dengan banyaknya pelajar atau mahasiswa yang datang belajar di Yogyakarta setiap tahunnya.

Di sebelah timur Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Timur yang beribukota di Surabaya. Luas wilayah Jawa Timur mencapai 47.799,75 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 39.107.095 jiwa. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di enam provinsi di Pulau Jawa tersebut tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk provinsi di Pulau Jawa

Sumber: [www// Kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), diolah

NO	PROVINSI	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )	JML PENDUDUK
1	DKI Jakarta	664,01	9.988.495
2	Jawa Barat	35.377,76	42.332.370
3	Banten	9.662,92	9.978.932
4	Jawa Tengah	32.800,69	34.897.757
5	DI Yogyakarta	3.133,15	3.542.078
6	Jawa Timur	47.799,75	39.107.095
	<b>Jumlah</b>	<b>129,438,28</b>	<b>139.846.727</b>

Dari Tabel 2 terlihat bahwa provinsi dengan penduduk terbanyak adalah provinsi Jawa Barat, diikuti kemudian dengan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

## 4.2. Hasil Regresi Linier Sederhana

### 4.2.1. Data yang diolah

Data yang dilakukan regresi ialah data pendapatan daerah sebagai variabel bebas dan data tingkat IPM sebagai variabel terikat. Data merupakan data panel, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 untuk enam provinsi yang diteliti. Data pendapatan daerah provinsi-provinsi di Pulau Jawa adalah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Daerah Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Seluruh Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

TAHUN	trilyun rupiah						
	DKI JAKARTA	DIY	BANTEN	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	INDONESIA
2010	23,026	1,374	3,139	9,742	6,626	9,980	116.802.488
2011	28,297	1,60	3,755	11,054	7,548	11,493	140.001.241
2012	35,379	2,17	5,414	16,878	11,694	15,543	186.010.396
2013	39,517	2,58	6,230	19,237,	13,343	17,372	205.780.2
2014	43,824	3,14	7,068	22,311	15,157	20,772	233.277.409
2015	44,209	3,40	7,328	24,010	16,828	22,228	242.706.3
2016	59,005	3,92	8,005	26,807	22,026	22,663	279.342.5

Data tingkat IPM provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010—2016 adalah sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Seluruh Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

TAHUN	DKI JAKARTA	DIY	BANTEN	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	INDONESIA
2010	76.31	75.37	67.54	66.15	66.08	65.36	66,53
2011	76.98	75.93	68.22	66.67	66.64	66.06	67,09
2012	77.53	76.15	68.92	67.32	67.21	66.74	67,70
2013	78.08	76.44	69.47	68.25	68.02	67.55	68,31
2014	78.39	76.81	69.89	68.8	68.78	68.14	68,90
2015	78.99	77.59	70.27	69.5	69.49	68.95	69,55
2016	79.60	78.38	70.96	70.05	69.98	69.74	70,18

#### 4.2.2. Uji Normalitas dan Uji Korelasi

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Tests Normalitas Kolmogorov Smirnov

NO	Data	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
1	Pendapatan DKI Jakarta	,188	7	,200*	,970	7	,896
2	Pendapatan DIY	,145	7	,200*	,961	7	,823
3	Pendapatan Banten	,175	7	,200*	,927	7	,530
4	Pendapatan Jawa Barat	,164	7	,200*	,943	7	,663
5	Pendapatan Jawa Tengah	,145	7	,200*	,966	7	,865
6	Pendapatan Jawa Timur	,190	7	,200*	,911	7	,400
7	IPM DKI Jakarta	,105	7	,200*	,989	7	,992
8	IPM DI Yogyakarta	,159	7	,200*	,962	7	,835
9	IPM Banten	,120	7	,200*	,985	7	,979
10	IPM Jawa Barat	,134	7	,200*	,960	7	,822
11	IPM Jawa Tengah	,140	7	,200*	,958	7	,798
12	IPM Jawa Timur	,116	7	,200*	,979	7	,957

Keterangan: \*. *This is a lower bound of the true significance.*

Pada uji distribusi normalitas sebagaimana Tabel 5 di atas, terlihat bahwa signifikansi variabel pendapatan lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel pendapatan memiliki distribusi normal. Begitu juga pada data IPM juga menunjukkan distribusi normal karena signifikansi variabel pendapatan lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Dengan demikian pada kedua data tersebut dapat dilakukan olah regresi linier.

Pada uji korelasi Pearson diperoleh hasil sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Uji Signifikansi Korelasi Antara Pendapatan dan IPM Pada Tingkat Kepercayaan 99%

NO	PROVINSI	KORELASI PEARSON	TES SIGNIFIKANSI	KETERANGAN
1	DKI Jakarta	0,975	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
2	Jawa Barat	0,989	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
3	Banten	0,988	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
4	Jawa Tengah	0,973	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
5	DI Yogyakarta	0,965	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
6	Jawa Timur	0,976	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
7	Nasional	0,988	0,000	Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Keterangan: tingkat kepercayaan 99%

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pada seluruh provinsi di Jawa dan provinsi secara nasional, kekuatan korelasi (nilai korelasi Pearson) lebih besar dari 0,80. Hal ini berarti pendapatan daerah dan IPM memiliki hubungan yang signifikan dan sangat kuat.
- Pada seluruh provinsi di Jawa dan provinsi secara nasional, nilai p kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat korelasi yang bermakna antara pendapatan daerah dan IPM.
- Pada seluruh provinsi di Jawa dan provinsi secara nasional arah korelasi adalah positif (+). Hal ini berarti semakin besar nilai variabel pendapatan maka semakin besar pula nilai variabel IPM.

Kedua hal tersebut menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana kinerja pendapatan daerah terhadap IPM di provinsi-provinsi di Pulau Jawa?”. Dari hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan IPM memiliki hubungan yang bermakna dengan korelasi (hubungan) yang sangat kuat dan hubungan ini bersifat positif, dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap penambahan pendapatan daerah, meningkatkan angka IPM.

#### 4.2.3. Hasil Regresi Linier Sederhana

Dari proses regresi linier dengan tingkat kepercayaan 99% diperoleh hasil sebagai berikut.

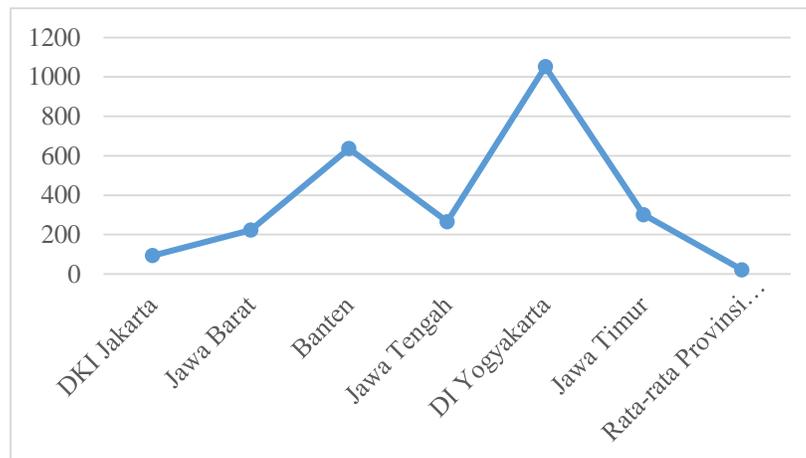
Tabel 6. Hasil Regresi Linier Sederhana

NO	PROVINSI	KONSTANTA (a)	KOEFISIEN REGRESI (b)
1	DKI Jakarta	74,297	0,090
2	Jawa Barat	63,954	0,223
3	Banten	65,596	0,637
4	Jawa Tengah	64,482	0,266
5	DIY	73,935	1,051
6	Jatim	62,344	0,301
7	Nasional	63,797	0,023

Dari hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kurun waktu tahun 2010—2016, hubungan antara pendapatan dengan IPM di masing-masing provinsi di Pulau Jawa adalah sebagai berikut.

- a. Provinsi DKI Jakarta:  $Y=74,297+0,094 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan IPM sebesar 0,094.
- b. Provinsi Jawa Barat:  $Y = 63,954 + 0,2235 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Barat, meningkatkan IPM sebesar 0,2235.
- c. Provinsi Banten:  $Y = 65,596 + 0,6375 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Banten, meningkatkan IPM sebesar 0,6375.
- d. Provinsi Jawa Tengah:  $Y = 64,482+ 0,2664$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan IPM sebesar 0,2664.
- e. Provinsi DI Yogyakarta:  $Y = 73,935 + 1,052 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi DI Yogyakarta, meningkatkan IPM sebesar 1,052.
- f. Provinsi data Jawa Timur:  $Y = 62,344 + 0,3010 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan IPM sebesar 0,3010.
- g. Provinsi secara nasional:  $Y = 63,797 + 0,0225 X$ . Hal ini berarti setiap tambahan pendapatan satu trilyun di provinsi-provinsi di Indonesia, rata-rata meningkatkan IPM sebesar 0,0225.

Selanjutnya kinerja provinsi-provinsi wilayah penelitian tersebut dapat dibantu dengan Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Kinerja Provinsi di Pulau Jawa Dalam Hubungan Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa kinerja pemerintah provinsi dalam peningkatan IPM, berurutan dari yang paling tinggi adalah: 1). Provinsi DI Yogyakarta, 2). Provinsi Banten, 3). Provinsi Jawa Timur, 4). Provinsi Jawa Tengah, 5). Provinsi Jawa Barat, dan 6). Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja di atas rata-rata secara nasional seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh provinsi di pulau Jawa memiliki kinerja “Baik” dalam pencapaian IPM. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab perbedaan koefisien regresi pada provinsi-provinsi tersebut adalah jumlah penduduk yang berbeda, luas wilayah yang berbeda, atau kebijakan arah pembangunan yang berbeda.

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### 5.1. Simpulan

Dari hasil regresi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki korelasi positif dan sangat kuat terhadap IPM, dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti jika pendapatan daerah bertambah maka IPM meningkat. Di semua provinsi di Pulau Jawa, setiap peningkatan pendapatan meningkatkan IPM, namun besaran peningkatan IPM pada masing-masing provinsi berbeda. Dilihat dari besaran peningkatan IPM untuk setiap tambahan pendapatan maka provinsi DIY memiliki performance yang paling bagus, diikuti Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Namun demikian, seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja “Baik” karena berada di atas rata-rata seluruh provinsi di Indonesia.

### 5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bahkan kelurahan/desa dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan pendapatan semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setidaknya yang diukur dari peningkatan usia harapan

hirup, lama pendidikan, dan pendapatan. Namun demikian perlu dianalisis lebih lanjut mengapa peningkatan IPM di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, perbedaan luas wilayah, atau perbedaan kebijakan pembangunan.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya memasukkan unsur pendapatan sebagai variabel dependent. Pada penelitian berikutnya hendaknya dimasukkan variabel-variabel lainnya, misalnya jenis pengeluaran/belanja dan besarnya distribusi pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE.
2. Aziza, Kurnia Sari, 2017, *70 Persen Penduduk Indonesia di Jawa, tapi Tanahnya cuma 6 Persen*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/11/181303426/70.persen.penduduk.indonesia.di.jawa.tapi.tanahnya.cuma.6.persen..>, diakses 21 September 2018, pukul 16.30 WIB.
3. Badan Pusat Statistik, - , *Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru)*, diunduh dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>, tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.
4. Badan Pusat Statistik (BPS), 2017, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*. BPS, Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, *Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013*, Bappenas Jakarta, diunduh dari [perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/139281-%5B\\_Konten...pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/139281-%5B_Konten...pdf), tanggal 17 September 2018, pukul 20.54 WIB.
6. Badrudin, Rudy, 2017, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi 2 Cetakan Pertama. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
7. Dahlan, M Sopiudin, 2001, *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan, Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS*, Seri Evidence Based Medicine 1, Edisi 4, Jakarta, Salemba Medika.
8. Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
9. Iskandar, Azwar and Subekan, Achmat (2014): *Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)*. Published in: *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, Vol. Vol.I/, No. ISSN 0852-6737 : 79-101, Jakarta.
10. Juliarini, Aniek. 2018. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Bali Dan Nusa Tenggara*. Belum dipublikasikan.

11. Kusriyawanto.2014. *Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010*. Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako. e-Jurnal Katalogis. Volume 2 Nomor 7, Juli 2014 hlm 111-123 ISSN: 2302-2019, diakses dari <https://media.neliti.com/.../155748-ID-pengaruh-penerimaan-dan-pengeluaran-peme.pdf>, tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.22 WIB.
12. Maulana, Ridwan, dan Prasetyo Ari Bowo. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011*. Jejak 6 (2) (2013): 103-213. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/307679042>\_ tanggal 23 September 2018 pukul 15.38 WIB
13. Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi
14. Maiharyanti, Eva. 2011. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan, Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27991> tanggal 23 September 2015 pukul 15.32 WIB.
15. Melliana, Ayunda, dan Ismaini Zain. 2013. *Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel*. Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, No.2, (2013) 2337-3520 (2301-928X Print). Surabaya. Universitas Airlangga. Diakses dari [http://ejournal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/4844](http://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4844), tanggal 22 September 2018 pukul 15.50 WIB
16. Nujum, Syamsu, dkk. 2016. *Analysis Of The Reciprocal Relationship Of Local Government Expenditure Towards Human Development Index (HDI) And Its Influence On Economic Performance In South Sulawesi*. Journal of Humanity Vol 4, No 1. Diakses dari <http://journalofhumanity.org/index.php/jh/article/view/57> pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.06 WIB
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
19. Ranis, Gustav. 2005. *Human Development: Beyond the HDI*, Yale University, Frances Stewart, Oxford University diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/Beyond\\_the\\_Human\\_Development\\_Index/download](https://www.researchgate.net/publication/Beyond_the_Human_Development_Index/download), diunduh tanggal 22 September 2018 pukul 11.09 WIB.
20. Sangh, Smith. 2016. *Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis*. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS) – volume3 issue7 July 2016. National

- Institute of Bank Management. Pune, India. Diunduh tanggal 22 September 2018 pukul 11.05 WIB
21. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ke-5. Bandung, Alfabeta.
  22. Supranto, J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh Jilid 2. Jakarta, Erlangga.
  23. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
  24. Rusydi, Duta Sabiila, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia. *Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012*. Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php>, diunduh tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.22 WIB.
  25. Yuliani, Tutik, 2015, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur*, Jejak 8 (1) (2015): 1-88. DOI: 10.15294/jejak.v7i1, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak>, diunduh tanggal 20 Juli 2018 pukul 19.12 WIB.
  26. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diunduh tanggal 28 juni 2018 pukul 10.05 WIB.
  27. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1181/rekapitulasi-realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-daerah-provinsi--juta-rupiah---2006-2016.html> , diunduh tanggal 28 Juni 2018 pukul 10.30 WIB.
  28. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>, diunduh tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.22 WIB
  29. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta>, diunduh tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.32 WIB
  30. <http://www.wisataarea.com/2016/12/pulau-jawa.html>, diunduh tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.40 WIB
  31. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>, diunduh 16 Juli 2018, 08.36 WIB
  32. <https://dosnekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/sumber-pendapatan-daerah>, diakses 30 Juli 2018, pukul 04.41 WIB